

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang bergerak dalam pelayanan umum bidang perumahan dan pemukiman masyarakat secara akurat dan terpercaya, dimana selama ini bergabung di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman dan baru berdiri sebagai Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara pada bulan Januari tahun 2020.

Pembentukan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara tidak hanya sekedar penyesuaian terhadap undang-undang, tetapi sebagai wilayah otonomi yang memiliki ciri khas daerah kurang maju, diperlukan penguatan pada lembaga perangkat daerah, tujuannya untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan pemukiman dengan tujuan mendukung adanya tata pemerintahan daerah yang baik (*Good Government*) menjadikan Kabupaten Nias Utara yang “Berdaya Saing, Nyaman dan Sejahtera.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Utara No. 22 tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara, maka Organisasi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bendahara
- d. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Perumahan dan
 2. Kawasan Pemukiman

- e. Seksi terdiri dari:
 - 1. Pendataan dan Perencanaan
 - 2. Penyediaan dan Pembiayaan

4.1.2 Temuan Penelitian

Salah satu bentuk perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara telah menyusun dalam laporan keuangannya menggambarkan posisi keuangan mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara mempedomani Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! penyajian laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk kepentingan untuk beberapa hal, antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Utara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas, manajerial, transparansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Nias Utara.
- e. Cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

4.1.3 Efisiensi Keuangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Bupati Nias Utara No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Utara No. 35 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Utara No. 35 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Utara dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bupati Nias Utara merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Dalam penelitian ini, penelitian hanya dapat menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja instansi, yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024. Dalam periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi jumlah pendapatan, belanja dan surplus serta defisit pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara 2023 - 2024

Tahun Anggaran 2024			
1.	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	0,00
2.	Jumlah Belanja Daerah	Rp	20.988.569.712,00
3.	Surplus/(Defisit)	Rp	(20.988.569.712,00)
Tahun Anggaran 2023			
1.	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	50.000.000,00
2.	Jumlah Belanja Daerah	Rp	19.868.236.999,00
3.	Surplus/(Defisit)	Rp	(19.868.236.999,00)
Pendapatan		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		0,00	10.199.934,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00. Hal ini terjadi karena terjadi masa transisi pemerintahan baim di eksekutif maupun di legislatif, sehingga tidak berjalan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya defisit anggaran dan meningkatnya utang pemerintah terhadap lembaga keuangan dalam hal ini Bank Sumut Cabang Gunungsitoli untuk menutup biaya rutin dan belanja pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tahun berkenaan, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Belanja SKPD

Belanja SKPD	Tahun 2024 (Rp)	% 2024	Tahun 2023 (Rp)	% 2023
	20.897.478.255,00	99,57	16.695.797,00	99,13

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Jumlah realisasi belanja per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3:
Realisasi Belanja Operasional

Belanja Operasional	Tahun 2024 (Rp)	% 2024	Tahun 2023 (Rp)	% 2023
	11.724.285.159,90	95,56	11.245.930.832,00	96,0

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran TA. 2024 (Rp)	Realisasi TA. 2024 (Rp)	%	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.439.660.000,00	1.405.367.500,00	97,6	1.229.880.000	1.171.854.125,00	95,2
Belanja Barang dan Jasa	10.336.443.100,00	10.318.917.659,09	99,8	10.133.895.210	10.074.076.707,00	99,4
Belanja Modal	9.212.466.612,00	9.173.193.095,53	99,5	8.504.461.789	8.449.866.248,00	99,3
Jumlah	20.988.569.712,00	20.897.478.254,62	99,6	19.868.236.999	19.695.797.080	98,2

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Belanja Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	% 2024	Tahun 2023 (Rp)	% 2023
	11.724.285.159,90	99,5	11.245.930.832,00	98,96

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Belanja Pegawai pada tahun 2023 dan 2024 dapat diuraikan seperti tabel berikut:

Tabel 4.6
Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	Anggaran TA. 2024 (Rp)	Realisasi TA. 2024 (Rp)	%	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.934.937.000,00	1.796.805.586,00	92,8	1.954.294.630,00	1.810.594.987,00	92,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	934.937.000,00	8.796.805.586,00	92,8	754.294.630,00	710.594.987,00	92,65
Honorarium PNS	88.760.000,00	88.160.000,00	99,3	96.240.000,00	96.240.000,00	100
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.760.000,00	88.160.000,00	99,3	96.240.000,00	96.240.000,00	100
Jumlah	2.023.697.000,00	1.884.965.586	93,1	2.050.534.630,00	1.906.834.987	92,99
Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	% 2024	Tahun 2023 (Rp)		% 2023	
	2.744.848.101,00	97,54	2.706.899.147,00		98,37	

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian anggaran dan rincian Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Rincian Belanja Barang dan Jasa TahunAnggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Anggaran 2024 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	10.336.443.100,00		10.318.917.659,00	99,83
Belanja Barang	545.694.836		525.069.837,00	5,84
Belanja Barang Pakai Habis	145.694.836		125.069.837,00	5,84
Belanja Jasa	867.403.426		848.648.078,00	9,23
Belanja Jasa Kantor	543.966.706		825.225.400,00	9,23
Belanja Pemeliharaan	488.532.825		63.532.825	1,76
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173.020.000		48.020.000	5,76
Belanja Perjalanan Dinas	112.207.960		107.597.361	5,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.207.960		107.597.361	5,89
Jumlah Beban Barang dan Jasa	13.325.171.649,00		12.969.678.358,00	7,27
Total Belanja Modal	Tahun 2024 (Rp)	% 2024	Tahun 2023 (Rp)	% 2023
	13.325.171.649,00	100	12.969.678.358,00	00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian belanja Modal Tahun 2024 dirinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	
Jumlah Belanja Modal	9.212.466.612,00	9.173.193.095,00	99,57	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)	%
	135.250.000,00	99,54	85.969.900,00	100

Sumber: Dinas Perkkim Kabupaten Nias Utara, 2025

Tabel 4.9
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.238.500,00	23.238.500,00	100
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	1.205.000	1.205.000	100
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.320.000	13.320.000	100
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.776.000	1.776.000	100
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.937.500	6.937.500	100

Sumber: Dinas Perkkim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Perkakas Khusus (*Special Tools*) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.205.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 1.205.000,00. Belanja modal Perkakas Khusus (*Special Tools*) tersebut meliputi: Kotak Panel dan Bohel 1 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.205.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 1.205.000,00.
2. Realisasi Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 13.320.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 13.320.000,00. Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor tersebut meliputi: Lemari

Tempahan 1 unit dengan realisasi anggaran Rp. 13.320.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 13.320.000,00.

3. Realisasi Belanja Modal Peralatan Studio Video untuk pekerjaan lapangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.776.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 1.776.000,00. Sedangkan realisasi tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.900.000,00. Belanja Modal Peralatan Peralatan Studio Video tersebut meliputi: *Tripod Camera* 2 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.776.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 1.776.000,00.
4. Realisasi Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 6.937.500,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 6.937.500,00. Sedangkan realisasi tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 7.045.000,00 . Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* tersebut meliputi: *External/Portable Hardisk* 2 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.937.500,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 6.937.500,00.

Tabel 4.10

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	621.504.367,69	99,52	1.236.193.250,00	99,22
Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)	%
	8.416.438.727,84	99,58	6.677.703.098,00	99,33

Sumber: Dinas Perkukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Untuk belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

Rincian Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi T.A. 2024 (Rp)	%	Realisasi T.A.2023 (Rp)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Pemasangan/Instalasi Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)	%
	7.550.000,00	100	5.000.000	100

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Tabel 4.12

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
Belanja Modal Aset Lainnya	7.550.000,00	100	5.000.000,00	100
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan <i>Franchise</i>	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	2.550.000,00	100	0	0

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 7.550.000,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp 5.000.000,00. Belanja Modal Aset Lainnya meliputi:
 1. Biaya Pembelian Lisensi *Zoom* selama 1 Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00.
 2. Biaya Pembelian Lisensi *Software* 1 Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.550.000,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 2.550.000,00.

Tabel 4.13
Surplus - Defisit Belanja modal Aset

Surplus/Defisit	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(4.652.855.761,00)	(4.527.470.674,00)

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Surplus merupakan selisih lebih antara Pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja dalam tahun anggaran berkenan. Realisasi *surplus* (defisit) Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. (4.652.855.761,00) merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp.0,00 dikurangi dengan jumlah realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024.

Realisasi *surplus* (defisit) Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (4.527.470.674,00) merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 105.000.000,00 dikurangi dengan jumlah realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagai berikut:

Tabel 4.14
Pos Laporan Perbahan Saldo Anggaran

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. (4.868.324.547,88)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. (4.652.855.761,00)

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal pada tanggal 1 Januari 2024. Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah NIHIL.

Penjelasan Pos-pos Neraca, sebagai berikut:

Tabel 4.15**Pos Neraca**

ASET	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.989.220.075,40	3.458.293.480,05
Aset Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	105.111.888,00	105.111.888,00
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Saldo pada rekening kas daerah per tanggal 31 Desember 2024 di Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar NIHIL, dan Kas di Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16**Kas Pengeluaran**

Kas Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp.0,00. Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 104.143.051,00, sebagai berikut:

Tabel 4.17**Kas Persediaan**

Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	104.143.051,00	72.521.085,00

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Sedangkan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 72.521.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)		Tahun 2023 (Rp)	
		Jumlah Barang	Nilai Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang
1	Alat Tulis Kantor	33.954	16.986.775,00	1.136	6.709.214,00
2	Bahan Cetak	0	0,00	35.124	18.464.717,00
3	Kertas dan Cover	209	10.978.699,00	189	10.191.451,00
4	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	500	5.000.000,00	200	2.000.000,00
5	Bahan Komputer	58	10.562.760,00	56	9.693.630,00
6	Perabot Kantor	222	5.092.603,00	164	3.635.028,00
7	Alat Listrik	50	5.675.541,00	65	6.328.221,00
8	Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya	108	3.944.673,00	2	372.960,00
9	Bahan Obat- obatan	0	0,00	0	0,00
10	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	0,00	0	0,00
11	Persediaan Bahan Pembantu	0	0,00	0	0,00
12	Suku Cadang Alat	0	0,00	0	0,00
13	Suku Cadang Alat Kendaraan Kantor	2	6.800.000,00	0	0,00
14	Suku Cadang Lainnya	13	39.102.000,00	5	15.298.030,00
Jumlah		35.116	104.143.051,00	36.941	72.521.085,00

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Tabel 4.19
Nilai Aset Tetap

Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.884.108.187,40	3.352.985.166,05

Sumber: Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.20
Rincian Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dan 2024

o	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Tanah	12.502.038.705,00	12.487.638.705,00
	Peralatan dan Mesin	2.305.048.169,00	1.281.809.669,00
	Gedung dan Bangunan	13.010.034.700,00	13.010.034.700,00
	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	0	0
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.284.264.605,00	2.284.264.605,00
	Akumulasi Penyusutan	(3.123.571.788,00)	(2.529.569.227,00)
	Jumlah	26.977.814.391,00	26.534.178.452,00

Sumber: Dinas Perkkim Kabupaten Nias Utara, 2025

Jumlah Aset Tetap Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, 2025 per 31 Desember 2024 setelah koreksi sebesar Rp. 2,884,108,187.40. Jumlah Aset Tetap Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara per 31 Desember 2023 setelah koreksi sebesar Rp. 3.352.985.166,05. Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Nilai Aset Tetap

Tanah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	12.502.038.705,00	12.487.638.705,00

Sumber: Dinas Perkkim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo nilai aset tetap, dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22

Rincian Mutasi Tambah - Kurang Saldo Tanah Tahun Anggaran 2024

Saldo awal Tahun 2024	Rp. 12.487.638.705,00	
Mutasi Tambah Tahun 2024	Rp 14.400.000,00	
Mutasi Kurang Tahun 2024	Rp. 0,00	
Saldo Akhir Tahun 2024	Rp 12.502.038.383,00	
Peralatan dan Mesin	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.195.331.826 ,00	1.679.329.383 ,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Permahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara, 2025 per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.195.331.826,00 dan Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.679.329.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23**Rincian Mutasi Tambah - Kurang Saldo Peralatan dan Mesin TA 2024**

	2024	2023
Saldo awal Tahun	Rp. 1.679.329.383,00	Rp. 1.645.510.483,00
Mutasi Tambah	Rp. 516.002.443,00	Rp. 85.969.900,00
Mutasi Kurang	0	Rp. 52.151.000,00
Kapitalisasi Biaya Umum	0	0
Saldo Akhir Tahun	Rp. 2.195.331.826,00	Rp. 1.679.329.383,00
Gedung dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	13.411.161.669,77	13.246.528.101,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Jumlah perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor seperti Biaya Umum, Belanja Konsultan Perencanaan, Belanja Konsultan Pengawasan, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.411.161.669,77 dan Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.246.528.101,00.

Tabel 4.24**Rincian Mutasi Tambah - Kurang Saldo Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024**

	2024	2023
Saldo awal Tahun	Rp. 13.246.528,00	Rp. 23.367.093.283,00
Mutasi Tambah	Rp. 248.221.518,77	Rp. 1.451.613.900,00
Mutasi Kurang	Rp. 83.587.950,00	Rp. 11.572.179.082,00
Saldo Akhir Tahun	Rp.13.411.161.	Rp.

	669,77	13.246.528.101,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0	0

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Nias Utara, 2025 per 31 Desember 2024 sama dengan per 31 Desember 2023. Nilai perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 dan 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai (tidak termasuk nilai tanah). Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00.

Tabel 4.25

Rincian Mutasi Tambah - Kurang Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024

	2024	2023
Saldo awal Tahun	Rp. 477.364.109,00	0,00
Mutasi Tambah	Rp. 0,00	Rp. 477.364.109,00
Mutasi Kurang	Rp. 477.364.109,00	Rp. 0,00
Saldo Akhir Tahun	0,00	Rp. 477.364.109,00
Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.777.500,00	1.777.500,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara per 31 Desember 2024 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai. Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing Rp. 1.777.500,00.

Tabel 4.26
Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.284.264.605,00	2.284.264.605,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.123.571.788,60	2.529.569.227,95

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Bupati Nias Utara, dimana Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu berdasarkan tahun saat aset tersebut diperoleh meskipun aset tersebut diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari, penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh.

Nilai Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 3.291.838.790,60 yang terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (2.970.093.558,40)
- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. (61.099.796,00)
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. (260.645.436,20)

Tabel 4.27:
Nilai Penyusutan Aset Tetap

Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	138.550.000,00	441.550.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara yang telah diserahkan kepada masyarakat namun belum ada naskah hibah atau penghapusan aset kecuali rumah tidak layak

huni yang langsung diserahkan oleh Bupati Nias Utara saldo tahun 2024 dan 2023 adalah masing- masing NIHIL.

Tabel 4.28
Nilai Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	8.450.000,00	2.570.000,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.450.000,00 yaitu Lisensi dan *Franchise* (Lisensi *Zoom* dan *Software*) dan Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.570.000,00.

Tabel 4.29
Nilai Aset Lain- Lain

Aset Lain- lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Saldo Aset Lain- lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing- masing adalah sebesar Rp. 0,00. Saldo ini merupakan Aset dalam keadaan rusak berat.

Tabel 4.30:
Nilai Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	27.272.486.617,77	27.649.815.153,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp 27.272.486.617,77 dan Rp 27.649.815.153,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut Tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Entitas.

4.1.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 105.000.000,00. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.622.067.261,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 5.880.269.650,20.

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 Jumlah Beban Pegawai sebesar Rp. 1.884.965.586,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.906.834.987,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 4.31

Rincian Beban Pegawai – LO Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA. 2024 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Kenaikan dan Penurunan (%)
Beban Pegawai	1.884.965.586,00	1.906.834.987,00	(1,15)
Beban Gaji dan Tunjangan	1.796.805.586,00	1.711.542.487,00	4,98
Beban Honorarium PNS	88.160.000,00	98.321.250,00	(10,33)
Beban Honorarium Non PNS	0	0	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	0,00	731.250,00	0,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32:
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO Tahun Anggaran 2024

Uraian Jenis Beban	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan dan Penurunan (%)
Beban Barang	124.873.411,00	95.512.187,00	30,74
Beban Jasa	2.441.098.078,00	2.453.143.742,00	(0,49)
Beban Pemeliharaan	63.532.825	57.751.500,00	10,01
Beban Perjalanan Dinas	107.597.361,00	108.213.884,00	(0,57)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.737.101.675	2.714.621.313	0,83

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Jumlah Beban Hibah pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing NIHIL. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing NIHIL. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing NIHIL. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 adalah Nihil dan Tahun 2023 berikut rinciannya:

Tabel 4.33**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun Anggaran 2024**

Uraian Jenis Beban	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan dan Penurunan (%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	492.115.478,65	1.261.363.350,20	(39,01)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.524.000,00	2.524.000,00	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.440.549,60	274.599.474,30	(24,20)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	234.585.099,80	754.156.391,85	(31,10)
Beban Penyusutan Komputer	127.096.929,80	357.419.046,80	(35,56)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	20.200.694,00	39.903.674,00	(50,62)
Beban Penyusutan Jaringan	41.268.205,45	41.268.205,45	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	492.115.478,65	1.261.363.350,20	(39,01)

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Beban Bantuan Keuangan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing NIHIL. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.34**Rincian Pos Luar Biasa – LO Tahun Anggaran 2024**

Uraian	TA. 2024	TA 2023
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.3.458.293.480,05 sedangkan Nilai ekuitas awal pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.381.044.956,25. Nilai Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (5.121.929.165,65) sedangkan Nilai Surplus (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (5.777.819.650,20). Surplus-LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 00,00 terdapat pada Koreksi Nilai Kas dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 Koreksi atas Nilai Aset Tetap sebesar Rp. 00,00. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.989.220.075,40 sedangkan Nilai Ekuitas tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.458.293.480,05. Jumlah perubahan Ekuitas pada akhir tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.35
Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2024	2023
Ekuitas Awal	3.458.293.480,05	2.381.044.956,25
RK PPKD	4.652.855.761,00	4.632.470.674,00
Surplus/Defisit - LO	(5.121.929.165,65)	(5.777.819.650,20)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Lain- lain	0,00	2.222.597.500,00
Jumlah Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	00,00	00,00
Jumlah Ekuitas Akhir	2.989.220.075,40	3.458.293.480,05

Sumber: Dinas Perkakim Kabupaten Nias Utara, 2025

4.1.5 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara tahun 2024, antara lain:

- a. Kekurangan sumber daya manusia (ASN) dan tenaga teknis profesional media dan tenaga teknis jaringan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara.
- b. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan interkoneksi jaringan dengan Perangkat Daerah yang belum terhubung pada Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) Kabupaten Nias Utara sehingga belum mencapai target maksimal Perangkat Daerah yang terhubung pada JIDP berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara tahun 2021 - 2026.

4.1.6 Hasil Wawancara Penelitian terhadap Informan

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sumber data adalah Kepala Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, Sekretaris Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara. Berikut adalah hasil wawancara penelitian yang telah disusun berdasarkan jabatan dan peran masing-masing informan:

a. Informan Kunci Pertama

Nama : Bapak Arisman Hulu, SE., MM

Jabatan : Kepala Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa, 8 Juli 2025

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana strategi dinas dalam meningkatkan efisiensi keuangan?

Jawaban: *“Kami fokus pada program prioritas dan evaluasi rutin untuk memastikan penggunaan anggaran tepat guna.”*

2. Apa indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran?

Jawaban: *“Kami menggunakan rasio antara input dan output serta realisasi fisik dan keuangan.”*

3. Apa tantangan utama dalam menjaga efisiensi keuangan?

Jawaban: *“Keterbatasan dana, birokrasi panjang, dan perubahan kebijakan pusat menjadi tantangan utama”.*

4. Bagaimana peran kepala dinas dalam mengontrol efisiensi keuangan?

Jawaban: *“Sebagai kepala dinas, saya melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan.”*

5. Bagaimana Anda memastikan anggaran digunakan tepat sasaran?

Jawaban: *“Melalui perencanaan berbasis kinerja dan audit internal.”*

6. Apakah ada pelatihan SDM terkait efisiensi anggaran?

Jawaban: *“Ya, ada pelatihan rutin bagi pegawai mengenai manajemen anggaran dan pelaporan.”*

7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran?

Jawaban: *“Kami mengakomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang.”*

8. Apa kebijakan yang diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran?

Jawaban: *“Refocusing dan rasionalisasi kegiatan non-prioritas.”*

9. Bagaimana implementasi sistem pengawasan internal dilakukan?

Jawaban: *“Kami membentuk tim pengawasan dan menggunakan sistem laporan elektronik.”*

10. Apa dampak langsung dari efisiensi anggaran terhadap masyarakat?

Jawaban: *“Masyarakat lebih cepat merasakan manfaat pembangunan seperti rumah layak huni dan sanitasi.”*

Dari hasil wawancara, Arisman Hulu menekankan bahwa keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program, namun dengan manajemen yang baik realisasi anggaran masih dapat mencapai target di atas 90%. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2021) bahwa efisiensi keuangan dapat diukur dari kemampuan organisasi menghasilkan output maksimal dengan input yang terbatas. Pernyataan beliau juga menegaskan pentingnya prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Informan Kunci II

Nama : Bapak Noverman Syukur Lahagu, SE., MIP

Jabatan : Sekretaris Dinas Perukim Kabupaten Nias Utara

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa, 8 Juli 2025

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana peran sekretaris dalam pengelolaan keuangan yang efisien?

Jawaban: *“Saya bertugas memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan efisien.”*

2. Apa saja langkah efisiensi yang dilakukan dalam penyusunan anggaran?

Jawaban: *“Kami melakukan penyusunan berdasarkan prioritas kebutuhan dan analisis program tahun sebelumnya.”*

3. Apakah pelaporan realisasi anggaran dilakukan tepat waktu?

Jawaban: *“Ya, pelaporan dilakukan secara berkala dan sesuai jadwal yang ditetapkan.”*

4. Bagaimana memastikan program sesuai dengan anggaran yang tersedia?

Jawaban: *“Melalui sinkronisasi kegiatan dengan plafon anggaran yang tersedia.”*

5. Apa kendala terbesar dalam pelaksanaan efisiensi?

Jawaban: *“Kurangnya SDM dan lambatnya pencairan dana dari pusat.”*

6. Bagaimana sistem pencatatan keuangan dilakukan?

Jawaban: *“Kami menggunakan aplikasi keuangan daerah dan dokumen fisik sebagai backup.”*

7. Apakah ada kerjasama lintas bidang untuk efisiensi?

Jawaban: *“Ya, kami sering rapat koordinasi antar bidang untuk menyatukan program kerja.”*

8. Bagaimana pengaruh efisiensi terhadap kinerja pegawai?

Jawaban: *“Efisiensi membuat pegawai lebih disiplin dan terarah dalam menjalankan tugas.”*

9. Bagaimana Anda menilai efektivitas pengawasan anggaran?

Jawaban: *“Cukup efektif, terutama setelah adanya sistem pengendalian internal.”*

10. Apakah sistem digital membantu efisiensi?

Jawaban: *“Sangat membantu, terutama dalam penyusunan laporan dan pelacakan anggaran.”*

Menurut Bapak Noverman Lahagu, sistem perencanaan yang realistis dan berbasis kebutuhan lapangan sangat penting untuk menjaga efisiensi keuangan. Perencanaan yang tepat dapat meminimalisasi deviasi antara anggaran dan realisasi. Hal ini konsisten dengan pandangan Halim (2022) yang menekankan bahwa efisiensi sektor publik dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta implementasi.

c. Informan Kunci Ketiga

Nama : Bapak Aferli Hulu, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DinaS
Perukim Kabupaten Nias Utara

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa, 8 Juli 2025

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Apa tugas utama bidang Anda dalam mendukung efisiensi keuangan?

Jawaban: *“Kami merancang dan mengawasi pelaksanaan program perumahan agar tepat guna dan hemat anggaran.”*

2. Bagaimana pengaruh efisiensi terhadap capaian program perumahan?

Jawaban: *“Efisiensi meningkatkan fokus pada kegiatan prioritas sehingga target dapat dicapai dengan dana terbatas.”*

3. Apa indikator kinerja utama di bidang Anda?

Jawaban: *“Capaian jumlah rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman.”*

4. Bagaimana proses pengusulan kegiatan dilakukan?

Jawaban: *“Kami susun berdasarkan kebutuhan lapangan dan usulan musrenbang.”*

5. Apakah efisiensi berdampak pada kualitas pelayanan publik?

Jawaban: *“Ya, dengan anggaran efisien, pelayanan bisa lebih terfokus dan tidak tumpang tindih.”*

6. Bagaimana koordinasi antara bidang dan seksi lain?

Jawaban: *“Kami mengadakan rapat rutin untuk sinkronisasi program kerja.”*

7. Apa kendala yang paling sering ditemui di lapangan?

Jawaban: *“Kuranginya tenaga teknis dan lambatnya penyaluran dana.”*

8. Bagaimana Anda menilai realisasi fisik dibanding anggaran?

Jawaban: *“Realisasi fisik rata-rata 90% dan cukup seimbang dengan serapan anggaran.”*

9. Apa upaya peningkatan efisiensi yang dilakukan tahun ini?

Jawaban: *“Penggunaan sistem pelaporan elektronik dan perencanaan berbasis output.”*

10. Bagaimana proses evaluasi internal dilaksanakan?

Jawaban: *“Evaluasi dilakukan setiap triwulan dengan rapat kinerja.”*

Aferli Hulu menekankan bahwa efisiensi dapat tercapai apabila pengalokasian anggaran disesuaikan dengan skala prioritas. Ia melihat bahwa keterbatasan dana justru memaksa dinas lebih selektif dalam memilih program. Hal ini sejalan dengan Nasution (2020) yang membagi efisiensi keuangan menjadi efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Pernyataan Aferli mendukung konsep efisiensi alokatif, yaitu menempatkan dana pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

d. Informan Kunci Keempat

Nama : Bapak Ir. Suju Okman Zega, ST

Jabatan : Kepala Seksi Pendataan dan Pendataan Dinas Perukim

Kabupaten Nias Utara

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa, 8 Juli 2025

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana proses pendataan kebutuhan perumahan dilakukan?

Jawaban: *“Kami mengumpulkan data melalui survei lapangan dan koordinasi dengan desa/kelurahan.”*

2. Apa saja data yang paling penting dalam perencanaan anggaran?

Jawaban: *“Data jumlah rumah tidak layak huni, kebutuhan air bersih, dan sanitasi.”*

3. Bagaimana memastikan data yang digunakan akurat dan valid?

Jawaban: *“Melalui verifikasi lapangan dan perbandingan dengan data BPS.”*

4. Apa peran teknologi dalam perencanaan di seksi Anda?

Jawaban: *“Kami menggunakan software GIS dan aplikasi perencanaan.”*

5. Bagaimana proses penyusunan RKA dilakukan?

Jawaban: *“RKA disusun berdasarkan prioritas program yang telah disetujui kepala bidang.”*

6. Apa saja perubahan yang Anda lihat setelah penerapan efisiensi keuangan?

Jawaban: *“Ada efisiensi dalam waktu perencanaan dan lebih fokus pada data.”*

7. Apakah perencanaan yang efisien menjamin hasil yang optimal?

Jawaban: *“Tidak selalu, tetapi meningkatkan akurasi dan efektivitas program.”*

8. Bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan?

Jawaban: *“Melalui forum musrenbang dan survei persepsi masyarakat.”*

9. Apa tantangan dalam melakukan perencanaan berbasis data?

Jawaban: *“Kurangnya data real-time dan kendala akses ke wilayah terpencil.”*

10. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas rencana kerja?

Jawaban: *“Dengan membandingkan hasil program dan anggaran yang digunakan.”*

Suju Okman Zega menekankan bahwa akurasi data perencanaan sangat menentukan efisiensi anggaran. Menurutnya, tanpa data yang akurat, sulit membuat anggaran yang tepat sasaran. Pandangan ini sesuai dengan Mahmudi (2016) yang menegaskan bahwa efisiensi dalam sektor publik tidak hanya soal menghemat biaya, tetapi juga memastikan input digunakan secara tepat untuk mencapai output yang direncanakan.

e. Informan Kunci Kelima

Nama : Ibu Auguslin Sabtian Halawa, ST

Jabatan : Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perukim
Kabupaten Nias Utara

Hari/Tanggal Wawancara: Senin, 7 Juli 2025

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Apa peran seksi Anda dalam pengelolaan pembiayaan perumahan?

Jawaban: *“Kami mengatur penyediaan dan distribusi dana untuk program perumahan.”*

2. Bagaimana sistem alokasi dana dilakukan untuk program perumahan?

Jawaban: *“Alokasi berdasarkan hasil perencanaan dan usulan kegiatan dari lapangan”.*

3. Apa strategi utama dalam menjaga efisiensi pembiayaan?

Jawaban: *“Kami selektif terhadap kegiatan dan menghindari pemborosan.”*

4. Bagaimana mekanisme penyaluran dana ke program berjalan?

Jawaban: *“Melalui mekanisme DPA dan pelaporan pertanggungjawaban.”*

5. Apa kendala umum dalam penyediaan dana?

Jawaban: *“Penyesuaian alokasi dari pusat yang sering terlambat.”*

6. Bagaimana keterlibatan lembaga pembiayaan dalam program Anda?

Jawaban: *“Kami menjalin kerjasama dengan bank daerah dan program subsidi pusat.”*

7. Apakah efisiensi keuangan berdampak pada jumlah program yang dijalankan?

Jawaban: *“Ya, kami hanya fokus pada program yang benar-benar prioritas.”*

8. Bagaimana akuntabilitas keuangan dijaga di seksi Anda?

Jawaban: *“Dengan laporan keuangan berkala dan pengawasan dari atasan langsung.”*

9. Apakah ada audit rutin pada penggunaan dana?

Jawaban: *“Ya, dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan BPKP secara berkala.”*

10. Bagaimana Anda melihat efisiensi sebagai bagian dari budaya kerja?

Jawaban: *“Efisiensi sudah menjadi bagian dari prinsip kerja yang kami junjung.”*

Augustin Halawa menekankan bahwa digitalisasi sistem keuangan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi. Menurutnya, dengan sistem berbasis aplikasi, pelaporan lebih cepat dan akurat. Hal ini menguatkan temuan Fahmi (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam keuangan daerah meningkatkan akuntabilitas, mempercepat pelaporan, dan mendukung efisiensi secara keseluruhan.

f. Temuan Umum dari Seluruh Informan

Secara keseluruhan, semua informan menekankan bahwa efisiensi keuangan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci: perencanaan yang tepat dan berbasis data akurat, pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas yang jelas, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem

pengelolaan keuangan, serta akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Temuan lapangan ini memperkuat kajian pustaka yang menjelaskan bahwa efisiensi pada sektor publik erat kaitannya dengan penerapan prinsip value for money (Mardiasmo, 2021), implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Halim, 2022), serta pemanfaatan optimal teknologi digital dalam mendukung efisiensi operasional (Fahmi, 2023).

Seluruh informan juga menyepakati bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, lambatnya pencairan dana, dan kurangnya SDM kompeten, namun dengan penerapan manajemen yang baik dan sistem yang tepat, target realisasi anggaran masih dapat dicapai dengan baik di atas 90%, yang menunjukkan komitmen organisasi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

4.2 Pembahasan Temuan Penelitian

4.2.1 Pemetaan Hasil Pembahasan terhadap Rumusan Masalah

Pembahasan ini ditujukan untuk memberikan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan memetakan secara langsung keterkaitan antara temuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Bab I. Dengan demikian, pembahasan ini disusun lebih terstruktur, detail, dan mampu menggambarkan secara utuh bagaimana efisiensi keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara dianalisis melalui data kuantitatif maupun kualitatif. Struktur pembahasan ini dibagi sesuai dengan tiga rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai efisiensi keuangan, faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi keuangan, serta realisasi pelaksanaan keuangan pada dinas tersebut.

- a. Rumusan Masalah 1: Bagaimana Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara?

Berdasarkan hasil analisis data keuangan, diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2023 mencapai 90,51% dari total anggaran Rp. 19,5 miliar, dengan realisasi sebesar Rp. 17,65 miliar. Pada tahun 2024, tingkat realisasi meningkat hingga 97,7% dari alokasi Rp. 22,4 miliar, dengan realisasi sebesar Rp. 21,84 miliar. Secara rata-rata, realisasi selama dua tahun mencapai 94,25%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara memiliki tingkat efektivitas operasional yang tinggi, karena mampu merealisasikan hampir seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini sejalan dengan kerangka teoretis manajemen keuangan publik menurut Halim (2007) dan Mahsun (2013) yang menekankan bahwa efektivitas dapat diukur melalui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program.

Namun, realisasi belanja yang tinggi ini ternyata menyimpan paradoks fiskal yang cukup serius. Berdasarkan data dalam Tabel 4.1, pada tahun 2024, jumlah pendapatan daerah tercatat Rp. 0,00, sedangkan belanja daerah mencapai Rp. 4,65 miliar. Kondisi ini mengakibatkan defisit sebesar Rp. (4,65 miliar), yang kemudian ditutupi melalui pinjaman dari Bank Sumut Cabang Gunungsitoli. Artinya, meskipun belanja terealisasi dengan baik, sumber pendanaan sepenuhnya bergantung pada dana eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam merealisasikan program berjalan beriringan dengan kelemahan dalam efisiensi fiskal, karena kemandirian keuangan daerah tidak tercapai.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional Dinas memang tercapai melalui realisasi belanja yang tinggi, tetapi efisiensi fiskal belum terpenuhi. Dengan demikian, capaian ini lebih merefleksikan efektivitas teknis daripada efisiensi keuangan yang berkelanjutan.

- b. Rumusan Masalah 2: Apa Saja Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Keuangan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap efisiensi keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang dilakukan cenderung bersifat reaktif. Kepala Dinas, Arisman Hulu, menegaskan bahwa keterbatasan dana memaksa pihaknya untuk melakukan *refocusing* pada program prioritas, serta mengurangi alokasi pada kegiatan non-esensial. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi alokatif, di mana dana terbatas difokuskan pada program-program vital seperti pembangunan rumah layak huni.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Data menunjukkan jumlah pegawai berkurang dari 19 orang menjadi 16 orang. Secara finansial, hal ini mengurangi beban belanja pegawai dan menimbulkan kesan adanya efisiensi, karena realisasi belanja pegawai tetap tinggi (92–93%). Namun, dari sisi operasional, keterbatasan tenaga teknis justru mengurangi kapasitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, efisiensi yang tercapai lebih tepat disebut sebagai *efisiensi semu*.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Wawancara dengan Sekretaris Dinas, Noferman Syukur Lahagu, dan Kepala Seksi, Auguslin Sabtian Halawa, menegaskan bahwa penggunaan aplikasi keuangan daerah dan sistem digital memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi. Teknologi digital mempersingkat birokrasi, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Temuan ini sesuai dengan teori Fahmi (2023) mengenai peran digitalisasi dalam meningkatkan kinerja keuangan publik.

4. Pengawasan Internal

Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan BPKP membantu menjaga penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan

aturan dan mencegah penyimpangan. Pengawasan ini memberikan dorongan bagi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

5. Faktor Eksternal

Keterlambatan transfer dana dari pusat serta kenaikan biaya operasional menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi. Faktor eksternal ini menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh dinas.

Secara keseluruhan, efisiensi keuangan pada Dinas dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti perencanaan, SDM, dan teknologi digital, serta faktor eksternal berupa kebijakan dan transfer dana dari pemerintah pusat.

c. Rumusan Masalah 3: Bagaimana Realisasi Pelaksanaan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara?

Analisis realisasi anggaran berdasarkan pos belanja memperlihatkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran terealisasi dengan baik. Data Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Belanja Modal terealisasi 100% pada tahun 2023 dan 2024, sementara Belanja Barang dan Jasa mencapai realisasi 97,27%. Namun, terdapat beberapa pos belanja dengan realisasi 0%, seperti belanja makanan rapat dan belanja jasa pengiriman. Dana ini ditahan sebagai cadangan untuk kebutuhan insidental, yang menunjukkan adanya pola pengelolaan konservatif dalam pelaksanaan anggaran.

Lebih lanjut, keterkaitan antara realisasi belanja dengan capaian fisik dapat dilihat pada Tabel 4.36. Program pembangunan rumah layak huni dengan realisasi 95% berhasil menyelesaikan 190 unit rumah. Program perbaikan fasilitas permukiman dengan realisasi 92% berhasil memperbaiki 46 fasilitas. Sementara itu, pelatihan SDM dengan realisasi 96% telah memberikan peningkatan kompetensi kepada 20 staf. Fakta ini menunjukkan adanya korelasi positif antara realisasi anggaran dan output program, di mana meskipun terdapat keterbatasan fiskal, manfaat nyata bagi masyarakat tetap dapat diwujudkan.

Interpretasi ini menegaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara sudah cukup baik dalam hal realisasi anggaran dan pencapaian fisik, meskipun kemandirian fiskal masih menjadi tantangan serius.

4.2.2 Kesimpulan Pemetaan Pembahasan

- a. Efisiensi operasional dinas tercapai dengan realisasi anggaran tinggi di atas 94%, namun masih terdapat kelemahan dalam efisiensi fiskal akibat defisit dan ketergantungan pada dana eksternal.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi meliputi perencanaan reaktif berbasis prioritas, keterbatasan SDM, pemanfaatan teknologi digital, pengawasan internal, serta faktor eksternal seperti transfer dana pusat.
- c. Realisasi pelaksanaan keuangan dinas menunjukkan hubungan erat dengan pencapaian kinerja fisik, meskipun beberapa pos belanja tidak terealisasi dan kemandirian fiskal masih lemah.

4.2.3 Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan efisiensi keuangan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, beberapa langkah strategis dapat direkomendasikan:

- a. Peningkatan Perencanaan Anggaran Multi-Tahun agar lebih fleksibel, realistis, dan berbasis data lapangan.
- b. Penguatan Kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan penambahan tenaga teknis di bidang perumahan dan permukiman.
- c. Optimalisasi Sistem Digital dengan integrasi penuh sistem keuangan daerah berbasis real-time.
- d. Peningkatan Kemandirian Fiskal dengan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relevan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman dan transfer pusat.

Dengan demikian, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara dapat mempertahankan efektivitas operasional sekaligus memperkuat fondasi efisiensi fiskal untuk keberlanjutan jangka panjang.